

LAMPIRAN

Lampiran 1

Data Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul

No	Nama Organisasi Perangkat Daerah	Alamat
1.	Sekretariat DPRD	Jl. Jendral Sudirman 85 Bantul Telp. 0274-367417
2.	Kantor Inspektorat daerah	Jl. Prof.Dr.Soepomo, SH. Bantul Telp. 0274-367325, 0274-367675 inspektorat@bantulkab.go.id
3.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jl. Wachid Hasyim, Sumuran, Palbapang, Bantul, Yogyakarta, 55173 Telp. (0274) 8244004, Fax.(0274) 6462100 bpbd@bantulkab.go.id
4.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	Jl. Robert Wolter Monginsidi Telp. 0274-367533 bappeda@bantulkab.go.id
5.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jl. Robert Wolter Monginsidi Telp. 0274-367509 bkad@bantulkab.go.id
6.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Jl. Jendral Sudirman No. 91 Bantul Telp. 0274-367401 kesbanglinmas@bantulkab.go.id
7.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Jl. Robert Wolter Monginsidi Telp. 0274-367509 bkd@bantulkab.go.id
8.	Badan Pusat Statistik	Jl. Gatot Subroto No.3 Telp. 0274 367424
9.	Badan Pertanahan	Jl. Ringroad Timur, Manding, Tirenggo, Kec. Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55714
10.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jl. Gatot Subroto No.1 Bantul

No.	Nama Organisasi Perangkat Daerah	Alamat
11.	Dinas Perhubungan	Kompleks II Kantor Pemda. Bantul, Manding, Sabdodadi Bantul Telp. 0274-367321 dinas.perhubungan@bantulkab.go.id

12.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kompleks II Kantor Pemda. Bantul, Manding, Sabdodadi Bantul
13.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jl. P. Senopati, Palbapang Bantul Telp. 0274-367310/0274-368279 dinas.pu@bantulkab.go.id
14.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Jl. Kolonel Sugiyono No.1 Bantul
15.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bantul	Kompleks II Kantor Pemda. Bantul, Manding, Sabdodadi Bantul
16.	Dinas Pariwisata	Kompleks II Kantor Pemda. Bantul, Manding, Sabdodadi Bantul Telp. 0274-368465 E-mail: dinas.pariwisata@bantulkab.go.id
17.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jl. Bantul Km. 7,5, Pucung, Pendowoharjo, Sewon - Bantul 55185
18.	Dinas Kebudayaan	Jl. Bantul Km. 7,5, Pucung, Pendowoharjo, Sewon - Bantul 55185
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Kompleks II Kantor Pemda. Bantul, Manding, Sabdodadi Bantul
20.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	Kompleks II Kantor Pemda. Bantul, Manding, Sabdodadi Bantul
21.	Dinas Perdagangan	Kompleks II Kantor Pemda. Bantul, Manding, Sabdodadi Bantul
22.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jl. Robert Wolter Monginsidi Telp. 0274-367509
23.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kompleks II Kantor Pemda. Bantul, Manding, Sabdodadi Bantul bkk@bantulkab.go.id
24.	Dinas lingungan Hidup	Kompleks II Kantor Pemda. Bantul, Manding, Sabdodadi Bantul

No.	Nama Organisasi Perangkat Daerah	Alamat
25	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	Kompleks II Kantor Pemda. Bantul, Manding, Sabdodadi Bantul Telp. 0274-367541 dinas.pertahut@bantulkab.go.id
26.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kompleks II Kantor Pemda. Bantul, Manding, Sabdodadi Bantul Telp. 0274-367526 disdukcapil@bantulkab.go.id
27.	Dinas Kesehatan	Kompleks II Kantor Pemda. Bantul, Manding, Sabdodadi Bantul Telp. 0274-367531 dinkeskabbantul@bantulkab.go.id

28.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Jl. Robert Wolter Monginsidi Telp. 0274-367509
29.	Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Jl. Robert Wolter Monginsidi Telp. 0274-367509
30.	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	Jl. Robert Wolter Monginsidi Telp. 0274-367509
31.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Jl. Robert Wolter Monginsidi Telp. 0274-368272
32.	Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah	Jl. Robert Wolter Monginsidi Telp. 0274-367509
33.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Deaerah	Jl. Robert Wolter Monginsidi Telp. 0274-367509
34.	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah	Jl. Robert Wolter Monginsidi Telp. 0274-367509
35.	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah	Jl. Robert Wolter Monginsidi Telp. 0274-367529
36.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah	Jl. Robert Wolter Monginsidi Telp. 0274-367509
37.	Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah	Jl. Robert Wolter Monginsidi Telp. 0274-367509
38.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	Jl. Robert Wolter Monginsid Telp. 0274-367509

Lampiran 2

KUESIONER

Lampiran 2

Kuesioner Penelitian

Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah, Pengawasan DPRD dan Budaya Organisasi Terhadap Penerapan *Good Governance*

Bagian A: Informasi Tentang Responden (Pengisi Kuesioner)

Silahkan isi item dibawah ini dengan memberikan tanda centang (✓) di kotak yang sudah disediakan.

1. Nama :
2. Jenis kelamin: Laki-laki Perempuan
3. Jabatan :
4. Nama SKPD :
5. Umur (tahun): <20 thn 20 -35 thn 36-50 thn 51-65 thn >65 thn
6. Gelar/Strata: SMA D3 S1 S2 S3
7. Latar belakang pendidikan : Akuntansi Manajemen Ekonomi Hukum
 Teknik lingkungan lainnya, sebutkan.....
8. Lama bekerja di perusahaan: <1 thn 1-5 thn 6-10 thn 11-20 thn >20 tahun

Silahkan centang pada kotak disamping ini dan tuliskan email anda jika menginginkan ringkasan penelitian ini

Alamat email :

*Terima kasih untuk partisipasi anda dalam penelitian ini.
Kami akan menjaga kerahasiaan informasi personal yang diberikan.*

Q -

Bagian B: Petunjuk Pengisian Kuesioner

Mohon Bapak/Ibu/Saudara memberikan tanda cek list (✓) pada salah satu pilihan jawaban sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara mengenai pertanyaan yang diberikan.

Pilihan jawaban :

- | | |
|-----|-----------------------|
| SS | = Sangat Setuju |
| S | = Setuju |
| N | = Netral |
| TS | = Tidak Setuju |
| STS | = Sangat Tidak Setuju |

Bagian C: Penerapan Good Governance

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Instansi pemerintah kabupaten Bantul (SKPD) menerima usulan dan pendapat dari warga dalam proses pengambilan keputusan.					
2.	Indenpendensi peradilan pada pemerintahan kabupaten bantul telah tercipta guna mencapai <i>good governance</i> .					
3.	SKPD kabupaten Bantul memiliki kebijakan terbuka terhadap pengawasan.					
4.	Tersedianya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau dari setiap kebijakan pemerintah (SKPD kabupaten Bantul sudah menerapkan sistem transparasi.)					
5.	Pemerintahan kabupaten Bantul sudah memberikan layanan pengadaan dengan prosedur yang mudah dipahami oleh masyarakat.					
6.	SKPD kabupaten Bantul memiliki sistem tindak lanjut yang cepat dari laporan dan pengaduan .					
7.	Pemerintahan (SKPD) kabupaten Bantul sudah berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.					
8.	Pemerintah kabupaten Bantul (SKPD) telah memberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.					
9.	Menurut saya SKPD kabupaten Bantul telah melaksanakan administrasi penyelengaraan negara yang berkualitas dan tepat sasaran dengan menggunakan sumber daya yang optimal.					
10.	Berkurangnya sistem tumpang tindih dalam penyelengaraan fungsi organisasi/unit kerja SKPD kabupaten Bantul.					
11.	SKPD kabupaten Bantul memiliki kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.					
12.	Pemerintah kabupaten Bantul memberikan sanksi yang ditetapkan pada setiap kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.					
13.	SKPD kabupaten Bantul memiliki visi dan strategi yang jelas dan memiliki kekuatan hukum.					
14.	Adanya dukungan dari pelaku dalam pelaksanaan visi dan strategi pada SKPD kabupaten Bantul.					

Bagian D: Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Menurut saya pelaksanaan tugas sudah sesuai dengan tingkat pendidikannya					
2.	Saya selalu menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu.					
3.	Menurut saya pegawai dapat bekerja sama dalam melakukan pekerjaannya.					
4.	Menurut saya pegawai yang memiliki kualitas kerja yang baik atau tinggi dapat diberikan penghargaan.					
5.	Menurut saya seharusnya pegawai bersikap ramah dan sopan kepada masyarakat yang membutuhkan layanan.					
6.	Menurut saya seharusnya pegawai cepat dan tanggap dalam menjelaskan setiap keluhan publik/masyarakat.					
7.	Pegawai SKPD kabupaten Bantul sudah memiliki tingkat kreativitas mencari tata kerja yang terbaik.					
8.	Menurut saya pegawai memiliki tingkat kemampuan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada atasan.					
9.	Menurut saya seharusnya pegawai ikut serta dalam pelatihan/kursus yang berhubungan dengan bidang tugasnya.					
10.	Menurut saya pegawai dituntut lebih kreatif dan inovatif.					

Bagian E: Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	APBD pada SKPD kabupaten bantul disusun dengan pendekatan kinerja.					
2.	Pemerintah kabupaten Bantul sudah menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.					
3.	Menurut saya jika ada perubahan, APBD ditetapkan paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran tertentu berakhir.					
4.	Menurut saya pendapatan daerah sudah disetor sepenuhnya tepat waktu ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.					
5.	Tindakan yang mengakibatkan atas beban APBD tidak akan dilakukan sebelum ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.					
6.	Pelaporan keuangan pemerintah kabupaten Bantul dibuat dalam bentuk laporan keuangan.					
7.	Menurut saya laporan keuangan dapat dimengerti dan disajikan sesuai ketentuan standar akuntansi yang diterima umum.					
8.	Menurut saya setiap pejabat pengelola keuangan daerah seharusnya menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan secara periodik.					
9.	Menurut anda perlukah dilakukannya financial audit terhadap laporan keuangan daerah.					
10.	Menurut anda perlukah dilakukannya value for money audit terhadap laporan keuangan daerah.					

Bagian F: Sistem Pengendalian Internal

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Menurut saya pemerintah kabupaten Bantul sudah memiliki integritas dan nilai-nilai etika.					
2.	Menurut saya pemerintah kabupaten Bantul sudah memiliki komitmen terhadap kompetensi.					
3.	Menurut saya pemerintah kabupaten Bantul sudah mempunyai falsafah (gagasan/pandangan) manajemen dan gaya operasi yang baik.					
4.	Menurut saya dalam instansi seharusnya terdapat struktur organisasi yang jelas.					
5.	Menurut saya perlu memiliki dewan komisaris atau komite audit atau yang setara dengan dewan komisaris atau komite audit.					
6.	SKPD kabupaten bantul tidak menerapkan prinsip pelimpahan tugas dan wewenang dalam organisasi.					
7.	Menurut saya pemerintah kabupaten bantul perlu adanya kebijakan dan prosedur kepegawaian.					
8.	Menurut saya perlu adanya penetapan pengendalian internal.					
9.	Menurut saya sudah terdapat upaya untuk mengidentifikasi, menaksir, menganalisis dan mengendalikan risiko internal mauapun eksternal.					
10.	Menurut saya informasi sudah diidentifikasi dan dikomunikasikan dengan baik.					
11.	Menurut saya sistem informasi telah berfungsi dengan baik.					
12.	Menurut saya pemantauan pada SKPD kabupaten bantul perlu dilakukan untuk menilai kualitas pengendalian internal.					

Bagian G: Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Saya menerapkan basis akrual untuk pengakuan Aset dalam Neraca Laporan Keuangan SKPD kabupaten Bantul					
2.	Saya menerapkan basis akrual untuk pengakuan Kewajiban dalam Neraca Laporan Keuangan SKPD kabupaten Bantul					
3.	Saya menerapkan basis akrual untuk pengakuan Ekuitas dalam Neraca Laporan Keuangan SKPD kabupaten Bantul					
4.	Saya menerapkan basis Kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pemiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran SKPD kabupaten Bantul					
5.	SKPD kabupaten Bantul mencatat kewajiban sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayar dimasa yang akan datang (untuk memenuhi kewajiban),dalam laporan keuangan.					
6.	SKPD kabupaten Bantul menyajikan suatu Transaksi yang ada dalam laporan keuangan dengan wajar bukan hanya sebagai formalitas (dicatat sesuai dengan substansi,realitas, dan ekonomi).					
7.	SKPD kabupaten Bantul menyajikan Peristiwa lain yang ada dalam laporan keuangan dengan wajar bukan hanya sebagai formalitas (dicatat sesuai dengan substansi,realitas, dan ekonomi).					
8.	Laporan keuangan SKPD kabupaten Bantul menggunakan sistem perlakuan akuntansi yang sudah diterapkan (sama) pada periode-periode sebelumnya.					

Bagian H: Pengawasan DPRD

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1	DPRD terlibat dalam memberikan masukan saat penyusunan arah dan kebijakan umum APBD.					
2	Pemerintah kabupaten Bantul menyampaikan kebijakan umum anggaran (KUA) tahun anggaran berikutnya kepada DPRD sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.					
3	Pemerintah kabupaten Bantul bersama DPRD membahas KUA yang disampaikan oleh pemerintah daerah dalam pembicaraan pendahulu RAPBD.					
4	Menurut saya pemerintah kabupaten Bantul tepat waktu dalam mengajukan rancangan perda tentang APBD kepada DPRD.					
5	Menurut saya DPRD dapat menjelaskan tentang APBD yang telah disahkan.					
6	Menurut saya DPRD terlibat dalam memantau pelaksanaan APBD yang dilakukan oleh pemerintah daerah.					
7	Menurut saya praktek pelaksanaan APBD di laporan sesuai dengan yang di anggarkan.					
8	Pemerintah kabupaten Bantul menyampaikan laporan realisasi semester pertama APBD kepada DPRD selambat-lambat akhir juli yang bersangkutan.					
9	Pemerintah kabupaten Bantul memberikan laporan tahunan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban anggaran kepada DPRD selambat-lambatnya enam bulan setelah berakhir tahun anggaran yang bersangkutan.					
10	Menurut saya seharusnya DPRD meminta keterangan atas LPJ APBD yang disampaikan Pemda.					
11	Menurut saya seharusnya DPRD menanyakan laporan pertanggungjawaban APBD jika terjadi kejanganan.					

Bagian I: Budaya Organisasi

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1	Ditempat kami SKPD kabupaten Bantul, aparat tidak dikelompokkan menurut bidang kerja atau bidang profesi.					
2	Menurut saya aktivitas kerja sama aparat lebih diutamakan daripada kerja individual.					
3	Menurut saya keputusan yang diambil manajemen sangat mempengaruhi kinerja aparat.					
4	Ditempat kami SKPD kabupaten Bantul, aparat dituntun untuk bekerjasama dengan aparat lainnya.					
5	Menurut saya seharusnya terdapat peraturan dan pengawasan lansung dalam mengawasi kinerja aparat.					
6	Saya sebagai aparat berani mengambil resiko dalam bertindak.					
7	Ditempat kami SKPD kabupaten Bantul, aparat yang memiliki kinerja baik diberikan reward diluar faktor lain yang bukan kinerja.					
8	Saya memiliki sikap terbuka sebagai aparat terhadap kritikan.					
9	Dalam mengembangkan hasil kinerja manajemen lebih menekankan pada hasil dibanding proses yang digunakan.					
10	Ditempat kami SKPD kabupaten Bantul, terdapat pengawasan organisasi dalam mengubah lingkungan eksternal.					

Lampiran 3

Hasil Kuesioner Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

NO	KA1	KA2	KA3	KA4	KA5	KA6	KA7	KA8	KA9	KA10	KA
1	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	32
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
3	5	4	5	4	5	4	4	4	5	5	45
4	3	4	5	5	4	5	4	4	5	5	44
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
6	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	39
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
8	2	2	4	4	4	4	3	4	4	4	35
9	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	38
10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
11	4	4	4	5	5	5	4	5	4	5	45
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	41
13	4	4	5	4	5	5	5	4	5	4	45
14	4	3	4	4	5	5	4	4	4	5	42
15	4	5	5	5	5	5	4	4	4	5	46
16	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	38
17	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	38
18	2	4	4	4	5	4	4	4	5	4	40
19	5	5	4	5	4	5	5	4	5	5	47
20	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	44
21	2	3	3	2	2	2	3	3	2	2	24
22	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	37
23	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	49
24	5	5	4	4	5	4	4	5	5	5	46
25	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	41
26	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	38
27	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	38
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
30	4	4	4	4	4	5	4	5	5	4	43
31	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	48
32	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	41
33	2	2	3	3	2	2	3	2	2	3	24
34	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	38
35	5	5	5	4	5	4	5	5	5	4	47
36	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	37

Hasil Kuesioner Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil Kuesioner Sistem Pengendalian Internal

N O	SPI 1	SPI 2	SPI 3	SPI 4	SPI 5	SPI 6	SPI 7	SPI 8	SPI 9	SPI 10	SPI 11	SPI 12	SP I
1	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	45
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	47
3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	50
4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	46
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	46
7	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	45
8	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	47
9	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	47
10	4	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	56
11	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50
12	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	46
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
14	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	47
15	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	41
16	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	4	41
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	47
18	4	3	3	4	3	3	4	4	3	4	3	4	42
19	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	44
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
21	3	2	2	3	3	2	2	3	3	2	2	2	29
22	4	4	3	4	3	3	3	3	4	3	4	3	41
23	4	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	56
24	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	50
25	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	45
26	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	45
27	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	45
28	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	39
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
30	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	44
31	5	4	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	55
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	46
33	2	2	3	3	3	2	2	2	3	3	2	2	29
34	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	45
35	5	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	52
36	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	45

Hasil Kuesioner Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah

Hasil Kuesioner Pengawasan DPRD

Hasil Kuesioner Budaya Organisasi

NO	BO1	BO2	BO3	BO4	BO5	BO6	BO7	BO8	BO9	BO10	BO
1	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	35
2	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	39
3	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	42
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
5	5	4	4	5	5	4	4	5	5	5	46
6	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	36
7	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	38
8	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	36
9	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	39
10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
11	3	4	4	4	3	3	3	4	3	4	35
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	39
13	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	42
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
15	3	4	3	4	3	4	4	4	3	3	35
16	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	38
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
18	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	36
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
21	3	3	2	2	3	3	3	3	2	2	26
22	3	4	3	4	4	4	3	4	3	4	36
23	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
24	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	41
25	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	49
26	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	38
27	3	4	4	4	4	4	3	4	3	3	36
28	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	38
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
30	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	39
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
32	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	37
33	2	2	3	3	2	2	2	2	3	3	24
34	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	37
35	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	38
36	3	3	4	3	4	3	3	4	3	4	34

Hasil Kuesioner Penerapan *Good Governance*

Lampiran 4
Hasil Olah Data SPSS

UJI VALIDITAS

Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.	.898
Bartlett's Test of Sphericity	252.400
Df	45
Sig.	.000

Component Matrix^a

	Component
	1
KA1	.736
KA2	.794
KA3	.799
KA4	.839
KA5	.870
KA6	.832
KA7	.798
KA8	.829
KA9	.824
KA10	.816

Extraction Method:
Principal Component
Analysis.

a. 1 components
extracted.

Pengelolaan Keuangan Daerah

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.	.827
Bartlett's Test of Sphericity	360.689
df	45
Sig.	.000

Component Matrix^a

	Component
	1
PKD1	.825
PKD2	.890
PKD3	.759
PKD4	.881
PKD5	.872
PKD6	.905
PKD7	.855
PKD8	.861
PKD9	.892
PKD10	.888

Extraction Method:
Principal Component
Analysis.
a. 1 components
extracted.

Sistem Pengendalian Internal

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.	.886
Bartlett's Test of Sphericity	296.343
df	66
Sig.	.000

Component Matrix^a

	Component
	1
SPI1	.724
SPI2	.788
SPI3	.792
SPI4	.755
SPI5	.731
SPI6	.827
SPI7	.816
SPI8	.828
SPI9	.730
SPI10	.799
SPI11	.848
SPI12	.848

Extraction Method:
Principal Component
Analysis.

a. 1 components
extracted.

Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.	.889
Bartlett's Test of Sphericity	273.864
df	28
Sig.	.000

Component Matrix^a

	Component
	1
SAP1	.864
SAP2	.917
SAP3	.916
SAP4	.819
SAP5	.874
SAP6	.899
SAP7	.818
SAP8	.859

Extraction Method:
Principal Component
Analysis.

a. 1 components
extracted.

Pengawasan DPRD

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.	.899
Bartlett's Test of Sphericity	311.504
df	55
Sig.	.000

Component Matrix^a

	Component
	1
DPRD1	.783
DPRD2	.778
DPRD3	.730
DPRD4	.785
DPRD5	.778
DPRD6	.688
DPRD7	.791
DPRD8	.906
DPRD9	.931
DPRD10	.851
DPRD11	.843

Extraction Method:
Principal Component
Analysis.
a. 1 components
extracted.

Budaya Organisasi

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.	.887
Bartlett's Test of Sphericity	291.880
df	45
Sig.	.000

Component Matrix^a

	Component
	1
BO1	.898
BO2	.805
BO3	.786
BO4	.786
BO5	.860
BO6	.821
BO7	.773
BO8	.864
BO9	.842
BO10	.791

Extraction Method:
Principal Component
Analysis.
a. 1 components
extracted.

Penerapan *Good Governance*

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.	.858
Bartlett's Test of Sphericity	522.021
df	91
Sig.	.000

Component Matrix^a

	Component
	1
GG1	.896
GG2	.777
GG3	.746
GG4	.833
GG5	.885
GG6	.749
GG7	.862
GG8	.827
GG9	.843
GG10	.872
GG11	.841
GG12	.743
GG13	.846
GG14	.892

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 1 components extracted.

UJI RELIABILITAS

Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.941	10

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	36	100.0
	Excluded ^a	0	0.0
	Total	36	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Pengelolaan Keuangan Daerah Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.960	10

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	36	100.0
	Excluded ^a	0	0.0
	Total	36	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Sistem Pengendalian Internal
Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.945	12

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	36	100.0
	Excluded ^a	0	0.0
	Total	36	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah
Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.953	8

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	36	100.0
	Excluded ^a	0	0.0
	Total	36	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Pengawasan DPRD Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.946	11

Case Processing Summary

	N	%
Cases	Valid	36
	Excluded ^a	0
	Total	36

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Budaya Organisasi Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.947	10

Case Processing Summary

	N	%
Cases	Valid	36
	Excluded ^a	0
	Total	36

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Penerapan *Good Governance*
Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.965	14

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	36	100.0
	Excluded ^a	0	0.0
	Total	36	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

UJI STATISTIK DESKRIPTIF

Descriptive Statistics

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah	36	24	50	40.56	5.784
Pengelolaan Keuangan Daerah	36	24	50	40.53	6.026
Sistem Pengendalian Internal	36	29	60	46.03	6.120
Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah	36	20	40	32.00	4.342
Pengawasan DPRD	36	26	53	43.36	5.822
Budaya Organisasi	36	24	50	38.31	5.366
Penerapan Good Governance	36	32	69	55.44	7.105
Valid N (listwise)	36				

UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.03967224
	Absolute	.086
Most Extreme Differences	Positive	.086
	Negative	-.078
Kolmogorov-Smirnov Z		.517
Asymp. Sig. (2-tailed)		.952

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

UJI MULTIKOLINEARITAS

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
(Constant)	1.576	3.113		.506	.617		
Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah	.253	.120	.206	2.107	.044	.298	3.354
Pengelolaan Keuangan Daerah	.378	.135	.321	2.806	.009	.217	4.605
Sistem Pengendalian	.128	.137	.110	.937	.357	.204	4.896
1 Internal							
Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah	.383	.186	.234	2.060	.048	.220	4.548
Pengawasan DPRD	.430	.125	.352	3.450	.002	.272	3.670
Budaya Organisasi	-.223	.148	-.168	-	.144	.227	4.408
				1.503			

a. Dependent Variable: Penerapan Good Governance

UJI HETEROSKEDASTISITAS

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	.611	1.799		.339	.737
Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah	-.043	.069	-.200	-.626	.536
Pengelolaan Keuangan Daerah	-.083	.078	-.400	-	.296
1 Sistem Pengendalian Internal	.040	.079	.198	1.065	.614
Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah	.064	.107	.223	.597	.555
Pengawasan DPRD	.077	.072	.357	1.066	.295
Budaya Organisasi	-.030	.086	-.128	-.348	.730

a. Dependent Variable: ABS_RES

UJI KOEFISIEN DETERMINASI (*Ajudted R Square*)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.958 ^a	.918	.901	2.241

a. Predictors: (Constant), Budaya Organisasi, Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengawasan DPRD, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal

UJI NILAI-F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6	270.213	53.817	.000 ^b
	Residual	29	5.021		
	Total	35			

a. Dependent Variable: Penerapan Good Governance
 b. Predictors: (Constant), Budaya Organisasi, Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengawasan DPRD, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal

UJI t (t-test)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	1.576	3.113		.506	.617
	Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah	.253	.120	.206	2.107	.044
	Pengelolaan Keuangan Daerah	.378	.135	.321	2.806	.009
	Sistem Pengendalian Internal	.128	.137	.110	.937	.357
	Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah	.383	.186	.234	2.060	.048
	Pengawasan DPRD	.430	.125	.352	3.450	.002
	Budaya Organisasi	-.223	.148	-.168	-1.503	.144

a. Dependent Variable: Penerapan Good Governance

Lampiran 5

SURAT IZIN



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Robert Wolter Monginsidi 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Faks. (0274) 367796
Laman: www.bappeda.bantulkab.go.id Posel: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 2756 / S1 / 2018

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin Penelitian, Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
4. Surat Keputusan Kepala Bappeda Nomor 120/KPTS/BAPPEDA/2017 Tentang Prosedur Pelayanan Izin Penelitian, KKN, PKL, Survey, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Bantul.
- Memperhatikan : Surat dari : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)
Nomor : 115/A.1-II/FEB/IX/2018
Tanggal : 20 September 2018
Perihal : Izin Penelitian

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, memberikan izin kepada :

- 1 Nama : FIRDIAN! MEITIA INDESWARI
2 NIP/NIM/No.KTP : 6471025005970003
3 No. Telp/ HP : 0895346191019

Untuk melaksanakan **izin Penelitian** dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul : PENGARUH KINERJA APARATUR PEMERINTAH DAERAH, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, PENGAWASAN DPRD, DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP PENERAPAN GOOD GOVERNANCE (STUDI EMPIRIS PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL)
- b. Lokasi : SKPD Se-kabupaten Bantul
- c. Waktu : 21 September 2018 s/d 21 Maret 2019
- d. Status izin : Baru
- e. Jumlah anggota : -
- f. Nama Lembaga : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)

Ketentuan yang harus ditaati :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib mematuhi peraturan perundungan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Menjaga ketertiban, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan;
5. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah;
6. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk **hardcopy (hardcover)** dan **softcopy** (CD) kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan
7. Surat ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat izin sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat izin; dan
8. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Dikeluarkan : Bantul
Pada tanggal : 21 September 2018

A.n. Kepala,
Kepala Bidang Pengendalian Penelitian
dan Pengembangan, b. Kasubbid Analisa
Data dan Laporan



Ir. EDI PURWANTO, M.Eng.
NIP: 19640710 199703 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul (sebagai laporan)
2. Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
3. Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul
4. Ka. Inspektorat Daerah Kab. Bantul
5. Ka. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bantul
6. Ka. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab. Bantul
7. Ka. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bantul



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan Robert Wolter Monginsidi 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Faks. (0274) 367796
Laman: www.bappeda.bantulkab.go.id Posel: bappeda@bantulkab.go.id

Lampiran Nomor Izin : 070 / Reg / 2756 / S1 / 2018

8. Ka. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bantul
9. Ka. Badan Pusat Statistik Kab. Bantul
10. Ka. Badan Pertanahan Kabupaten Bantul
11. Ka. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul
12. Ka. Dinas Perhubungan Kal. Bantul
13. Ka. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bantul
14. Ka. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bantul
15. Ka. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Bantul
16. Ka. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bantul
17. Ka. Dinas Pariwisata Kab. Bantul
18. Ka. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bantul
19. Ka. Dinas Kebudayaan Kab. Bantul
20. Ka. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Bantul
21. Ka. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kab. Bantul
22. Ka. Dinas Perdagangan Kab. Bantul
23. Ka. Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul
24. Ka. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bantul
25. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bantul
26. Ka. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul
27. Ka. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bantul
28. Ka. Dinas Kesehatan Kab. Bantul
29. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
30. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
31. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
32. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
33. Kepala Bagian Administrasi Perekonomician Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
34. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
35. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
36. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
37. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
38. Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
39. Ka. Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bantul
40. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMY
41. Yang Bersangkutan ✓

No. : 115/A.1-II /FEB/IX/2018
Hal : Permohonan penelitian

Kepada Yth.
Kepala BAPPEDA Kabupaten Bantul
Komplek Parasamya, Jl. RW. Monginsidi No.1 Bantul
Bantul Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Sehubungan dengan tugas akhir skripsi, maka bersama ini kami Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, mohon ijin untuk mahasiswa berikut ini dapat melakukan penelitian, Data yang didapatkan akan kami gunakan untuk kepentingan Akademik.

Adapun mahasiswa tersebut adalah :

Nama	:	Firdiani Meitia Indeswari
Tempat / Tgl Lahir	:	Yogyakarta, 10 Mei 1997
N I M	:	20150420019
Program studi	:	Akuntansi
Alamat	:	Jl. Rotowijayan No. 5 Kraton Yogyakarta.
No. Telp	:	0895436191019

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 September 2018
Dekan,



Rizal Yaya, S.E., M.Sc., Ph.D., Ak., CA.

ADDRESS

ampus Terpadu UMY
Lingkar Selatan · Tamantirto · Kasihan · Bantul
yogyakarta 55183
donesia

CONTACT

Phone : +62 274 387656 ext.117
Fax : +62 274 387646
Email : info.feb@umy.ac.id
Web : www.umy.ac.id

TANDA TERIMA

Dari

Bappeda /UMY/

Tanggal

: 25 - 9 - 2018

Isi

: 125 penelitian
perdamaian M I
Tgl 21/9 - 21/10/19

Kode Surat

: 0701/1394

Penerima

Dwi
marajan

Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan
Komplek Pemda II Jl. Lingkar Timur Manding,
Tirenggo Bantul, Telp. 6460236, Fax. 6460182
Email : dppkp@bantulkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

LEMBAR DISPOSISI

INDEKS :	KODE	No URUT	TGL PENYELESAIAN
Penelitian.			

PERHAL / ISI RINGKAS
Swatiyin penelitian a/m.
Firdiani mitia Indeswari.
Nip. b471025005970003.

Judul. Pengaruh hinanya Aparatur pemerintah
tah jalur.

ASAL SURAT :	TANGGAL	NOMOR	LAMPIRAN
UIN - yogy.	21/9-18	070/Reg/2756/S.1/2018.	
DIAJUKAN / TERUSKAN KEPADА	INFORMASI / INSTRUKSI		
Vth. keabean yg Rekomendasi kelebihan		- Molor tahliku Sepelempang. 26-18 ay p	